



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 170/3 /DPRK/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SKALA PRIORITAS
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dibuat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues tentang Penetapan Program Legislasi Skala Prioritas Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Skala Prioritas Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Legislasi Skala Prioritas Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menyusun dan menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat mengajukan perubahan Program Legislasi Skala Prioritas yang telah disepakati bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2025.

Ditetapkan di Blangkejeren
 Pada Tanggal, II Agustus 2025 M
17 Shafar 1446 H



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
2. Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren; dan
3. Pertinggal.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRK GAYO LUES
 NOMOR : 170/3/DPRK/2025
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025 M
17 SHAFAR 1447 H

DAFTAR JUDUL RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES SKALA PRIORITAS TAHUN 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM	STATUS		DISERTAI		INSTANSI PEMERAKARSA
			BARU	UBAH	NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG ADAT ISTIADAT DAN SENI KEBUDAYAAN KABUPATEN GAYO LUES	Aspirasi Masyarakat Daerah	v		Sudah di DPRK		MAA
2.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh			Sudah di DPRK		MPD
3.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN		v				DINAS PARIWISATA
4.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES		v				BAGIAN HUKUM SETDAKAB
5.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GAYO LUES		v				BAPPEDA

NO.	JUDUL RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM	STATUS		DISERTAI		INSTANSI PEMERAKARSA
			BARU	UBAH	NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	RANCANGAN QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH		v				MPD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES



KETUA R.

ALL HUSIN